

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil tinjauan serta data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Pemerintah Kabupaten Sleman telah menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, yang menjadi isu penting dalam administrasi publik saat ini. Dengan menggunakan SIKD, proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan berlangsung dengan lebih terstruktur dan efisien, sehingga memudahkan akses informasi keuangan bagi publik. Akses yang lebih baik terhadap informasi ini tidak hanya dirasakan oleh para pemangku kepentingan, tetapi juga oleh masyarakat umum, yang kini dapat lebih mudah mengakses data yang sebelumnya mungkin sulit untuk diperoleh. Hal ini tentunya berdampak positif dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat dapat langsung melihat dan menilai bagaimana anggaran dikelola dan digunakan. Dengan demikian, SIKD berkontribusi dalam menciptakan iklim kepercayaan yang lebih besar antara

pemerintah dan masyarakat. Kejelasan dan keterbukaan informasi ini sangat penting, karena transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah tidak hanya mencerminkan komitmen pemerintah terhadap praktik yang baik, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran. Secara keseluruhan, keberadaan SIKD tidak hanya memperkuat tata kelola keuangan yang lebih baik, tetapi juga membantu membangun fundamental kepercayaan masyarakat terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.

2. Meskipun implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, terdapat sejumlah kendala yang masih perlu diatasi agar efektivitas sistem ini dapat maksimal. Kendala-kendala tersebut dibagi menjadi dua kategori, yakni faktor internal dan eksternal. Dari segi internal, salah satu kendala utama adalah ketidakstabilan jaringan internet yang sering kali mengganggu operasional SIKD. Jaringan yang tidak stabil mengakibatkan kesulitan dalam proses penginputan data ke dalam sistem, sehingga mengakibatkan data yang tidak akurat dan penundaan dalam pelaporan. Masalah ini dapat memperburuk kepercayaan publik, karena informasi yang disajikan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya dari pengelolaan keuangan. Selain itu, kesiapan pegawai dalam menggunakan sistem juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pegawai yang belum sepenuhnya memahami cara kerja SIKD, terutama di kalangan yang telah bertugas lama dan kurang familiar dengan teknologi. Hal ini

menyebabkan kesalahan dalam penginputan dan operasional sistem, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Di sisi lain, faktor eksternal juga menghadirkan tantangan yang tidak kalah signifikan. Salah satu kendala adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengoperasikan SIKD secara optimal. Banyak pegawai yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai penggunaan sistem baru ini, sehingga mereka merasa kesulitan dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat juga turut berperan dalam mengatur dan membatasi cara implementasi SIKD di daerah. Ketidakjelasan atau perubahan kebijakan yang mendadak dapat memperlambat proses implementasi dan adaptasi sistem di tingkat daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala-kendala ini, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan analisis mendalam mengenai kebutuhan pelatihan bagi pegawai, perbaikan infrastruktur jaringan, dan kerjasama lebih erat dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalkan kendala yang ada, sehingga implementasi SIKD dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta memberikan manfaat maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), diperlukan serangkaian solusi yang komprehensif dan terkoordinasi. Salah satu langkah utama adalah peningkatan pelatihan bagi pegawai yang terkait dengan penggunaan dan pengelolaan SIKD. Pelatihan ini harus dirancang secara menyeluruh, mencakup aspek teknis serta

pemahaman konseptual mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Program pelatihan yang efektif dapat mencakup berbagai metode, seperti workshop interaktif, tutorial online, serta sesi praktik langsung yang memungkinkan pegawai memahami fungsi sistem di dalam konteks pekerjaan mereka sehari-hari. Selain itu, penting untuk menghasilkan materi pelatihan yang mudah dipahami dan dapat diakses kapan saja oleh pegawai, guna mendorong pembelajaran mandiri yang berkelanjutan.

Di samping pelatihan, perbaikan infrastruktur jaringan juga menjadi elemen krusial yang tidak dapat diabaikan. Internet yang stabil dan cepat adalah prasyarat agar SIKD dapat berfungsi dengan optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berinvestasi dalam upgrade perangkat keras, seperti modem, router, dan server yang memadai, serta memilih penyedia layanan internet yang memiliki reputasi baik dalam hal stabilitas koneksi. Penjadwalan pemeliharaan yang berkala untuk infrastruktur ini juga perlu diterapkan untuk memastikan kinerja yang konsisten. Dengan memperbaiki infrastruktur jaringan, pegawai dapat melakukan penginputan data dan pelaporan tanpa terhalang oleh koneksi yang terputus atau lambat.

Terakhir, pengembangan program pendampingan yang berkelanjutan juga diperlukan untuk membantu pegawai dalam beradaptasi dengan sistem baru. Program ini bisa melibatkan mentor atau 'buddy system', di mana pegawai yang lebih berpengalaman membimbing rekan-rekannya yang baru dalam menggunakan SIKD. Pendampingan ini diharapkan dapat memberikan dukungan langsung dan praktis, mendorong kolaborasi antarpegawai serta memperkuat

budaya pembelajaran di lingkungan kerja. Dengan melaksanakan serangkaian solusi ini secara terpadu, diharapkan bahwa SIKD dapat beroperasi secara optimal dan memenuhi standar transparansi yang diharapkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman dapat menjadi lebih efisien, akuntabel, dan transparan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, sejumlah saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIKD yaitu :

1. Saran untuk Meningkatkan Pemahaman dan Keterampilan Pegawai dalam Penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Mengingat permasalahan yang muncul berkaitan dengan kurangnya pemahaman pegawai mengenai sistem informasi keuangan daerah, sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk menyusun program pelatihan yang komprehensif dan sistematis. Program ini harus dirancang tidak hanya sebelum implementasi sistem, tetapi juga dilakukan secara berkelanjutan pasca-implementasi. Pelatihan ini hendaknya mencakup aspek teknis dan konseptual penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), serta menerangkan manfaat sistem dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Metode pelatihan yang interaktif seperti simulasi penggunaan sistem, tutorial video, serta sesi tanya jawab dapat meningkatkan pemahaman pegawai yang beragam, terutama mereka yang lebih tua dan kurang familiar dengan teknologi.

Penempatan mentor atau "buddy system" di mana pegawai yang lebih berpengalaman membimbing rekan-rekannya juga dapat memfasilitasi proses belajar yang lebih efektif dan membangun kolaborasi di dalam organisasi.

2. Saran untuk Memperbaiki Infrastruktur Jaringan untuk Mendukung Operasional SIKD. Salah satu temuan yang signifikan adalah permasalahan ketidakstabilan jaringan internet yang seringkali mengganggu penggunaan SIKD. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan terhadap infrastruktur jaringan yang ada. Langkah-langkah yang perlu diambil meliputi memperbaiki atau mengganti peralatan seperti router dan modem, serta memilih penyedia layanan internet yang terpercaya dalam hal kelancaran dan kecepatan koneksi. Pemeliharaan berkala terhadap infrastruktur jaringan juga diperlukan untuk menjamin ketersediaan layanan yang optimal. Selain itu, penting untuk menyediakan opsi penyimpanan data secara lokal sebelum diunggah ke sistem, sehingga ketika jaringan terganggu, pegawai tetap dapat menginput data dan melakukan tugas mereka tanpa gangguan yang berarti. Pelatihan pegawai tentang cara efisien menggunakan sistem dalam kondisi jaringan yang tidak ideal juga harus menjadi bagian dari pendekatan ini. Dengan meningkatkan infrastruktur yang mendukung, diharapkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dapat terjaga dan produktivitas pegawai tetap optimal.
3. Saran untuk Kendala eksternal yang dihadapi oleh BKAD Sleman, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi menghambat implementasi SIKD, memerlukan perhatian yang

serius. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan analisis kebutuhan pelatihan staf secara mendalam dan menyusun program pengembangan keterampilan yang menyeluruh dan inklusif. Selain pelatihan, membangun saluran komunikasi yang aktif dengan pemerintah pusat dapat membantu mengatasi perubahan kebijakan yang mendadak. Melibatkan pemangku kepentingan dalam diskusi dan merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan adalah langkah yang sangat baik untuk menciptakan keterlibatan dan dukungan. Dalam hal ini, adakan forum konsultasi berkala antara pemangku kepentingan daerah dan pusat yang akan membahas dan merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Dengan mengatasi kendala-kendala ini secara efektif, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Sleman tidak hanya akan lebih akuntabel, tetapi juga transparan, sehingga membangun kepercayaan publik yang lebih baik serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambya, 2023, *Ekonomi Keuangan Daerah*, AURA CV, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Amrie Firmansyah, 2020, *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Karakteristik Pemerintah Daerah dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat*, CV Adanu Abimatra, Jawa Barat.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Badiud Hadi, 2010, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi APB Desa*, CV Kompak, Jakarta.
- Mahmudi, 2015, *Manajemen Keuangan Daerah*, PT Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2018, *Otonomi Manajemen & Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mikael Edowai, 2021, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*, CV Berkah Utami, Sulawesi Selatan.
- Mukhtar, 2022, *Akuntansi Pemerintah Daerah*, PT Larva Wijaya, Jakarta.
- Riawan Tjandra. W., 2003, *Hukum Keuangan Negara : Pengertian, ruang lingkup, pengelolaan dan penyelesaian kerugian negara*, PT Kanisius, Yogyakarta
- Sawir, M., 2022, *Akuntabilitas organisasi publik Konseptual dan praktik*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Jurnal

- Amali, M. N., & Suwandi, E. D, 2021, "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*.

- Amalia, R. N. 2021, "Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Lathifah, H., Frinaldi, A., & Putri. N. E, 2024, "Analisis Akuntabilitas Birokrasi Publik Dalam Sistem Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik", *Jurnal Professional*.
- Mau, M. G. Y., Sari, A. R., & Irianto, M. F, 2025, "Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi, Penerapan Prinsip Transparansi, Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Malang)", *Jurnal Akuntansi Neraca*.
- Prabowo, H., & Susanto, A. 2022, "Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik", *Jurnal Ilmiah Manajemen*.
- Pramono, D. H., & Subagijo, H. E. 2025, "Pengelolaan Keuangan Daerah Di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance". *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*.
- Sari, D. P., & Rahardjo, T. 2023, "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Setiawan, Y. G., et al. 2024, "Analisis Kinerja Inspektorat Kabupaten Sleman Terhadap Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Sleman".
- Vitriana, N., Agustawan, A., & Ahyaruddin, M, 2022, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru", *Digital Business Journal*.
- Zubaidah, A. N., & Nugraeni, N. 2023, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman", *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2022, No. 30, Tambahan Lembaran Negara No. 5323.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2005, No.140.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Lembaran Negara Tahun 2019, No.45.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Internet

Amira K, Pengertian Sistem Informasi, Tujuan dan Komponennya, <https://share.google/T6au9BWqKsQBhDseN>, diakses 27 September 2025.

Anindyadevi Aurelia, Apa itu Implementasi? Pengertian, Tujuan dan Contoh Penerapannya, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>, diakses pada 28 September 2025.

BPK Berperan dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-berperan-dalam-mendorong-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-pemerintah>, diakses 28 September 2024.

H. Setyawati, Tinjauan Pustaka Implementasi, https://digilib.stituwjombang.ac.id/160/3/NIM%202020.112.01.4345%20_BAB%20II.pdf, diakses 28 September 2025.

PRINSIP PENGELOLAAN APBD, <https://bacirokejogjakota.go.id/detail/index/9027>, diakses 28 September 2025.

Suyono, Pengertian Keuangan Daerah, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/05/04/keuangan-daerah-adalah>, diakses 27 September 2025.

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA

Lampiran 2. Wawancara di BKAD Sleman



